

TATA KELOLA KOLABORATIF PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PACITAN

Agus Supriyanto¹, Bambang Kusbandrijo², Joko Widodo³

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ags.supriyanto1745@gmail.com¹, b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id²,

jokowid@untag-sby.ac.id³

ABSTRAK

Merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian menganalisis peran aktor kolaboratif, menganalisis proses kolaborasi tata kelola pengembangan pariwisata Kabupaten Pacitan dan juga menganalisis kontribusi sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor kolaborasi telah dijalankan dengan baik sesuai perannya masing-masing. Berikut proses kolaborasi yang telah berlangsung; (1)Dinamika kolaborasi, antar aktor telah melakukan pengungkapan atas apa yang menjadi tujuan kolaborasinya, hal tersebut dituangkan dalam proses diskusi hingga tercipta motivasi bersama, (2)Tindakan kolaborasi, Disparpora sebagai aktor sentral memfasilitasi tindakan kolaborasi seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengelola dan komunitas (pokdarwis), memfasilitasi kegiatan akademisi untuk riset di Pacitan dan memfasilitasi diskusi dengan pegiat media sosial, (3)Kolaborasi telah menghadirkan dampak yang cukup signifikan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengembangan wisata dan objek wisata berkembang signifikan sesuai konsep Sapta Pesona. Proses kolaborasi berhasil meningkatkan kunjungan wisata ke Pacitan dan kontribusi sektor pariwisata ke PAD sebesar 7% pada tahun 2022.

Kata Kunci; *Pariwisata, Collaborative Governance, Penta Helix, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

It is a descriptive qualitative research with a research focus on analyzing the roles of collaborative actors, analyzing the collaborative process of Pacitan Regency tourism development governance and also analyzing the contribution of the tourism sector to the PAD of Pacitan Regency. The results showed that the roles of collaborative actors have been carried out well according to their respective roles. The following is the collaboration process that has taken place; (1) Collaboration dynamics, between actors have disclosed what the collaboration goals are, this is outlined in the discussion process to create mutual motivation, (2) Collaboration actions, Disparpora as a central actor facilitates collaboration actions such as training and technical guidance for managers and communities (pokdarwis), facilitating academic activities for research in Pacitan and facilitating discussions with social media activists, (3) Collaboration has had a significant impact, the community actively participates in tourism development and tourist attractions develop significantly according to the Sapta Pesona concept. The collaboration process succeeded in increasing tourist visits to Pacitan and the contribution of the tourism sector to PAD by 7% in 2022.

Keywords; *Tourism, Collaborative Governance, Penta Helix, Regional Original Revenue*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata di suatu wilayah didasarkan pada penekanan pada kebijakan pembangunan yang berbasis karakteristik lokal mengenai pemanfaatan potensi kelembagaan dan sumber daya. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa otonomi daerah mengacu pada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak hanya mengandalkan dana kompensasi pusat dan daerah tapi juga menggali potensi sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keberlanjutan (Ferizaldi, 2016). Salah satu sumber potensial PAD adalah sektor pariwisata. Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah dikuatkan oleh Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan menjelaskan bahwa keberadaan destinasi wisata di daerah akan memberikan dampak yang menguntungkan. Keuntungan tersebut antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melestarikan alam dan lingkungan, memupuk rasa cinta tanah air dan memperkuat jati diri bangsa (Fatkhul Muin, 2014). Kemudian untuk pengembangan kepariwisataan daerah utamanya untuk Kabupaten Pacitan, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa, salah satu tujuan dan sasaran misi Kabupaten Pacitan adalah menjadikan Kabupaten Pacitan sebagai daerah pengembangan pariwisata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, kebijakan ini disebut dengan otonomi daerah (Karsono & Syauket, 2021). Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada pemikiran bahwa daerah sendirilah yang mengetahui dengan baik keadaan dan kebutuhan masyarakatnya (Solihin, 2015). Tujuan otonomi daerah adalah untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Penerapan otonomi daerah berarti pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah perseorangan dan sarana hukum lainnya (Hoffman, 2022).

Khususnya pada Kabupaten Pacitan sendiri dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurun waktu 2013 – 2017 dapat dikatakan tinggi mencapai Rp 126 Miliar di tahun 2015 dan terus pada tren peningkatan di tahun berikutnya hingga mencapai Rp 202 Miliar pada tahun 2017. Hal ini semakin membuat *optimisme* pemerintah daerah untuk terus meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat tren positif pada kurun waktu 2013 – 2017. Kabupaten Pacitan sendiri saat ini merupakan salah satu aset vital Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dengan Pariwisatanya dan juga sektor

lainnya seperti Pajak, Retribusi daerah, dan lainnya. Walaupun Kabupaten Pacitan pernah dinyatakan menjadi daerah tertinggal pada tahun 2013 bersama Kabupaten Madiun dan juga Trenggalek, namun dengan berjalannya waktu perkembangan dari berbagai sektor penunjang dalam pariwisata, Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kontributor meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur pada tahun 2013 – 2017 dengan rata-rata Rp 128 miliar.

Tabel PAD Pacitan Periode 2016-2022

Tahun PAD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	1.232	1.081	1.333	1.373	1.308	1.309	1.393
Pertumbuhan PAD		-12,3%	23,3%	3,0%	-4,7%	0,1%	6,4%

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, diolah penulis pada 12 Agustus 2023

Industri pariwisata di Pacitan bisa dibilang menjadi pokok utama penopang ekonomi Pacitan selain sektor agraris. Untuk melihat pengaruh tersebut, peneliti coba jabarkan data kunjungan wisata di Pacitan dan data pembanding seperti table diatas yakni data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan agar bagaimana implikasi dari pengembangan sector pariwisata ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan terlihat. Berikut data kunjungan wisata di Pacitan per tahunnya.

Tabel Kunjungan wisata di Pacitan Per 2017-2022

Wisatawan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wisman	1.665	1.397	1.211	105	215	264
Wisnus	1.752.045	1.833.667	2.303.908	860.292	744.795	1.565.922
Total Kunjungan	1.753.710	1.835.064	2.305.119	860.397	745.010	1.566.186
Pertumbuhan		5%	73%	-63%	-13%	110%

Sumber: Data dari dokumentasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dikelola penulis pada 12 Agustus 2023

Dari kedua tabel diatas dapat kita ketahui bersama bahwa dalam jangka waktu 2017 sampai ke 2022, baik kunjungan wisata ke Pacitan Maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan pertumbuhannya bersifat fluktuatif dan saling berpengaruh. Kita bisa melihat bersama dari tahun 2018 dan 2019 ketika kunjungan wisata ke Pacitan mengalami peningkatan, PAD Kabupaten Pacitan tahun tersebut juga mengalami peningkatan yang cukup drastis, akan tetapi saat kunjungan wisata ke Pacitan mengalami penurunan, PAD Kabupaten Pacitan ikut turun seperti tahun 2020 ketika pandemic Covid-19 melanda Indonesia dan melumpuhkan sector pariwisata. Tahun 2020 ketika pandemic Covid-19, pariwisata Pacitan mengalami penurunan drastis sebesar 63% karena aktivitas masyarakat untuk beraktivitas di tempat umum dibatasi. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan itupun berdampak ke penurunan PAD Kabupaten Pacitan tahun 2020 sebesar 4%. Kala pandemic sudah mulai reda,

kebijakan untuk beraktivitas di area publik sudah mulai dilonggarkan kembali, kunjungan wisata ke pacitan berangsur meningkat dan terjadi pula perbaikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan.

Pacitan memiliki bentang alam yang indah dan memiliki value wisata yang bisa dikembangkan untuk menopang perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Pariwisata Pacitan sangat berpeluang menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur dan objek wisata yang paling menonjol di Pacitan yakni wisata alamnya utamanya wisata bahari, namun sangat disayangkan kurangnya dukungan infrastruktur dan promosi mengakibatkan pariwisata Kabupaten Pacitan kurang dikenal dan kalah bersaing dengan daerah lain apalagi dengan berhentinya sector pariwisata Kabupaten Pacitan tahun 2020-2021 tak kala pandemic Covid-19 melanda Pacitan, sangat dibutuhkan strategi dan kolaborasi untuk kembali menggaungkan dan memperkenalkan kembali pariwisata Pacitan. Pacitan merupakan daerah yang memiliki banyak potensi objek wisata, sehingga memerlukan pengembangan dan pengelolaan yang baik agar dapat menarik wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Pacitan. Melihat tren kunjungan wisatawan pada tahun 2019 hingga memasuki tahun 2022, menurut data yang dirilis oleh Dibudparpora Kabupaten Pacitan justru setiap tahunnya mengalami penurunan kunjungan wisata yang berdampak juga dengan menurunnya PAD Kabupaten Pacitan karena rendahnya kontribusi PAD dari sector pariwisata.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama berkunjung ke Pacitan dan pariwisatanya, masih terdapat beberapa kelemahan dan hambatan pariwisata yang sangat perlu segera diatasi dan diperbaiki ke depan. Kelemahan tersebut antara lain: (a)belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia di destinasi wisata; (b)fasilitas hotel dan akomodasi yang masih cukup terbatas; (c) keterbatasan adanya angkutan umum untuk mencapai destinasi wisata; (d)branding promosi yang masih kurang massif dan belum adanya paket wisata yang ditawarkan; (e)akses informasi kepariwisataan yang masih sulit diakses masyarakat luas. Mengingat dengan potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan dan adanya keterbatasan yang dimilikinya, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dari pemangku kepentingan terkait untuk mengoptimalkan potensi wisata tersebut.

Di Indonesia, merebaknya virus corona (Covid-19) telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah baik di sektor mikro, menengah, maupun makro. Salah satu sektor ekonomi unggulan di Indonesia yang cukup terdampak adalah sektor industri pariwisata (Cahyadi & Newsome, 2021). Sektor pariwisata sangat terdampak oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar dimana aktivitas masyarakat untuk berkegiatan dan melakukan perjalanan sangat dibatasi. Akibat kebijakan tersebut, jumlah wisatawan di berbagai objek wisata menurun sangat drastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,62% pada awal tahun 2020 (Samerdanta Sinulingga, 2021). Secara terpisah, menurut organisasi yang sama, penurunan tersebut disebabkan oleh merebaknya infeksi virus corona yang mulai masuk ke Indonesia pada

akhir Januari 2020. Industri pariwisata telah mengalami penurunan signifikan dalam jumlah wisatawan yang berkunjung, terutama wisatawan asing, serta pembatalan penerbangan dan hotel serta penurunan reservasi (Pham & Nugroho, 2022). Kondisi tersebut menjadikan masyarakat enggan berwisata di masa pandemi karena dampak virus corona yang menyebar tak terkendali hamper di semua daerah yang ada di Indonesia.

Program percepatan pemulihan sektor pariwisata (ekonomi) salah satunya ditempuh dengan kebijakan kolaboratif yang melibatkan berbagai *stakeholder* diluar pemerintah. Kebijakan kolaborasi dapat memberi kesempatan pada pemerintah untuk menentukan lokus dan fokus percepatan program serta difusi ke *stakeholder* yang paling relevan untuk berkolaborasi (Astuti, 2020). Dari peraturan pemerintah diketahui bahwa pembangunan pariwisata didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik juga diperhitungkan dalam integrasi sektor lain seperti sektor swasta dan publik. Secara teoritis, pengembangan sektor pariwisata yang melibatkan aktor non-negara dalam penelitian administrasi publik disebut sebagai *collaborative governance*, yang berfokus pada kerjasama yang menguntungkan antara sektor publik dan swasta berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat (Matthoriq et al., 2021).

Dalam pengembangan pariwisata di Pacitan, kolaborasi dijabarkan dengan kerjasama antar aktor dengan mengacu konsep *Penta Helix (Academics, Bussiness, Community, Government, Media)* (Insani et al., 2023). Pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan pasca pandemic untuk kembali menggaungkan dan memperkenalkan sector pariwisata Pacitan sebagai *The New Paradise of Java*, keterlibatan (kolaborasi) aktor non-pemerintah dalam pengembangan dan tata kelola kepariwisataan di Pacitan dianggap sebagai kebijakan dan langkah yang mendesak. Kolaborasi Pemerintah Pacitan dalam pengembangan pariwisata Pacitan bisa dilakukan dengan perusahaan multinasional yang berada di Pacitan, akademisi, praktisi atau pegiat wisata dan pegiat media sosial (*konten creator* dan *influencer*), serta masyarakat Pacitan itu sendiri. Program kolaborasi adalah kebijakan untuk melakukan percepatan pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan agar kembali mampu memberdayakan masyarakat lokal melalui wisata dan memberikan kontribusi positif ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan Pacitan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative governance

Collaborative governance merupakan kerjasama pemerintah dan aktor non pemerintah, yang mana kerjasama tersebut bukan hanya dimonopoli aktor pemerintah, tetapi juga ada keterlibatan private sector dan masyarakat untuk bermusyawarah menentukan langkah strategis dalam kolaborasinya.

Menurut Ansell & Gash (Gash, 2022), *collaborative governance* telah menggambarkan bagaimana keadaan saling ketergantungan yang terjadi antar aktor. Munculnya inisiatif untuk melakukan kolaborasi dilandasi atas kesadaran para aktor terkait

keterbatasan mereka. Berikutnya, aktor harus mengungkapkan keinginan dan kemauannya untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan aktor lain. Setiap aktor yang terlibat harus mengakui legitimasi aktor lainnya dan ketika para pemangku kepentingan terlibat dalam kolaborasi, mereka harus mengembangkan rasa tanggung jawab bersama atas proses kolaboratif tersebut (Wang & Ran, 2023).

Proses *collaborative governance*

Proses kolaborasi yang peneliti adopsi dalam penelitian ini adalah teori proses kolaborasi oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), dengan pertimbangan bahwa komponen atas bahasan dari proses kolaborasi yang diterangkan oleh Emerson lebih komprehensif dan tepat untuk acuan analisis atas permasalahan pengembangan pariwisata. Emerson, Nabatchi, & Balogh (*Collaborative Governance Regime*) menjelaskan secara rinci tentang bagaimana proses kolaborasi dinamis dan bersiklus dengan output tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum akhirnya mengacu pada dampak kolaborasi, dan proses adaptasi atas dampak sementara dari kolaborasi. Proses kolaborasi dinamis dan bersiklus; (1) Dinamika kolaborasi, (2) Tindakan kolaborasi, serta (3) Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi (Kurniadi & Suryadi, 2021).

Penta helix

Model *penta helix* memberikan gambaran lima jenis pemangku kepentingan, yakni pemerintah, komunitas, akademisi, bisnis dan media (Azwar et al., 2023). Model ini sangat berguna untuk permasalahan pemangku kepentingan daerah dimana masing-masing pemangku kepentingan mewakili kepentingan daerah yang berbeda. *Penta helix* merupakan perpanjangan dari strategi *triple helix* yang melibatkan berbagai elemen komunitas dan lembaga nirlaba untuk memungkinkan terjadinya inovasi (Widowati et al., 2019). Melalui kolaborasi yang sinergis, inovasi dicapai dengan didukung oleh berbagai sumber daya yang bekerja secara sinergis pula. Kelima komponen *penta helix* memiliki kontribusi yang saling terkait dan berkesinambungan (Hidayatullah, 2022). Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa model *penta helix* Dirancang khusus untuk mendukung pengembangan inovasi baru secara berkelanjutan. Oleh karena itu *penta helix* dipandang perlu untuk mendukung pengembangan inovasi baik di bidang pariwisata, bisnis, dan sektor lainnya. *penta helix* (ABCGM) adalah model kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor untuk melaksanakan rencana pengembangan inovasi.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Kabupaten Pacitan. Fokus penelitian menganalisis peran aktor kolaborasi dengan mengacu konsep *penta helix*, menganalisis proses tata kelola kolaborasi dengan perspektif teori *collaborative governance* oleh Kirk Emerson dan Stephen Balogh dan menganalisis kontribusi sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informan wawancara yakni bidang pengembangan dan bidang promosi Disparpora Kab. Pacitan, Pokdarwis di Kabupaten Pacitan, paguyuban PKL

Pantai Pancer Door, Pengelola Wisata, pelaku usaha penginapan di area wisata bahari Pacitan dan pegiat media sosial ari *official account Instagram "PacitanKu"*. Peneliti menggunakan teknik analisa data berdasar pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (Sahir, 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran aktor kolaborasi pengembangan pariwisata Kabupaten Pacitan

A. Akademisi (*Academics*)

Mengutip dari halaman resmi <https://ugm.ac.id/>, <https://uns.ac.id/>, dan website resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan UGM dan UNS telah melakukan penandatanganan kerja sama. Maksud dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan.

Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menjalin kerjasama sejak tahun 2021 dengan salah satu bentuk kerja samanya yakni program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Dalam kuliah kerja nyata tahun 2023, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan program pengembangan potensi lokal kawasan Geopark Gunungsewu yang berlokasi di Desa Bomo dan Piton, Kecamatan Punung. Selama kurang lebih 2 bulan, team kuliah kerja nyata dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menggali potensi dari 2 desa tersebut untuk pengembangan objek wisata. Nantinya pengembangan Geopark hasil penelitian dari proses pengabdian masyarakat oleh team kuliah kerja nyata dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dapat dikorversi menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Pacitan.

B. Bisnis (*Bussiness*)

Dalam hal ini sector bisnis yakni peneliti maksud adalah pelaku usaha yang berkecimpung dan terdampak sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan. Seperti contoh diarea objek wisata Pantai Pancer Door Pacitan, para pedagang yang tergabung dalam paguyuban PKL Pancer Door menyediakan berbagai kebutuhan yang kiranya diperlukan oleh wisatawan mulai kuliner, cinderamata hingga oleh-oleh. Para pedagang yang ada di area Pantai Pancer Door juga membantu menjaga kebersihan pantai, mereka juga tertib dalam berjualan sesuai dengan arahan dari pihak pengelola.

Selain pedagang yang berjualan diarea wisata, juga terdapat sector bisnis lain yaitu para pengusaha penginapan atau resort yang ada di lokasi objek wisata bahari Pacitan. Pengusaha resort atau penginapan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi wisatawan yang menghabiskan waktunya di Kabupaten Pacitan. Ketersediaan penginapan juga berpengaruh terhadap kunjungan wisata suatu daerah. Ketersediaan penginapan yang nyaman, ekonomis dan dekat dengan lokasi wisata

menjadi alasan tersendiri bagi wisatawan luar kota untuk lama menghabiskan waktunya di objek wisata. Hampir keseluruhan pantai yang ada di area wisata Bahari Pacitan telah dilengkapi dengan resort yang dikelola oleh pihak swasta bahkan di area wisata Pantai Watu Karung terdapat resort bertaraf internasional dengan view terbaik yang menghadap langsung kepantai dengan tarif permalam diatas 1 juta yang memang secara target pasarnya adalah wisatawan mancanegara yang menghabiskan waktu untuk kegiatan *surfing* di Pantai Watu karung.

C. Komunitas (*Community*)

Salah satu komunitas masyarakat yang menjadi penggerak tumbuhnya sektor pariwisata adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Menurut beberapa informan yang peneliti wawancarai, Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pacitan pembentukannya di inisiasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan yang mengintruksikan pemerintah desa untuk membentuk wadah dan forum masyarakat untuk menggali potensi pariwisata di daerahnya masing-masing. Dari pantauan penulis di lapangan, Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pacitan mayoritas tidak memiliki struktur organisasi yang jelas. Entitas organisasi dari pokdarwis yang ada hanya memiliki struktur organisasi yakni ketua pokdarwis yang mendapatkan Surat Keputusan langsung dari Bupati Pacitan, tetapi untuk struktur organisasi dalam Pokdarwis tersebut tidak begitu jelas, pun dengan keanggotaannya, tidak ada entitas organisasi yang mengikat status keanggotaan tersebut.

Meski tanpa entitas organisasi yang jelas, Pokdarwis yang ada di Kabupaten Pacitan tetap menjalankan fungsinya sebagai stakeholders penggerak wisata di tiap wilayahnya. Seperti contoh Pokdarwis Kelurahan Baleharjo yang memiliki objek wisata Pancer Door. Mereka secara rutin melakukan pertemuan dan musyawarah dengan membahas isu-isu dan kendala dalam pengelolaan pantai Pancer Door, dalam musyawarah tersebut, biasanya juga dihadiri oleh pengelola pantai Pancer Door dan Paguyuban PKL Pantai Pancer Door.

Pokdarwis merupakan salah satu aktor berpengaruh dalam pengembangan pariwisata daerah Pacitan. Hal ini terbukti dari setiap wawancara yang penulis lakukan baik dengan Pokdarwis maupun Pemerintah kabupaten Pacitan yang menyebutkan bahwa akar rumput pembagunan wisata berada di masyarakat dan Pokdarwis adalah komunitas masyarakat yang sadar akan potensi wisata didaerahnya dan dapat menarik masyarakat sekitar untuk beraktivitas di bidang pariwisata.

D. Pemerintah (*Government*)

Sebagai regulator dan pendamping, Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pariwisata juga ikut serta dalam pengembangan objek wisata di kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pariwisata memberikan dukungan menyeluruh di segala bidang, termasuk pengembangan pariwisata. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan adalah dengan

memberikan dukungan pengembangan fasilitas penunjang wisata, melakukan kerja sama dalam mempromosikan wisata Pacitan dan menguatkan *branding* “Pacitan Paradise Of Java” dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pacitan. Dinas Pariwisata juga menggandeng pemerintah daerah lain guna promosi wisata yang notabnya wisata adalah sector penguat ekonomi Pacitan.

Pada tahun 2022-2023, pemerintah Kabupaten Pacitan lebih berfokus pada promosi dan peningkatan kualitas sarana prasarana wisata yang ada di Pacitan. Untuk promosi wisata, Dinas Pariwisata juga telah bekerja sama dengan *Wonderful Indonesia* untuk mempromosikan wisata bahari Kabupaten Pacitan, rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dikombinasikan dengan promosi wisata dimana kegiatan-kegiatan budaya yang menampilkan kearifan lokal masyarakat Pacitan diselenggarakan di area objek wisata. Untuk pembangunan sarana prasarana, Pemerintah Pacitan giat melakukan perbaikan akses masuk ke area wisata dan menambah beberapa fasilitas lainnya utamanya di objek-objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Pacitan.

E. Media (*Media*)

Dalam konteks penelitian ini, peneliti membatasi media yang berperan dalam promosi wisata pacitan adalah platform media sosial Instagram dan Tiktok yang memiliki sebaran pengikut yang luas dan atensi masyarakat yang luar biasa terdapat sebaran informasi dari 2 platform media sosial tersebut.

Untuk menyebarkan informasi pariwisata secara luas, upaya promosi melalui pemanfaatan media sosial dinilai sangat diperlukan. Media sosial berperan penting dalam pertumbuhan dan kemajuan pariwisata dengan memberikan informasi rinci mengenai destinasi wisata yang dibutuhkan wisatawan domestik dan internasional (Akasse & Ramansyah, 2023). Selain itu, melalui media sosial, influencer juga dapat terlibat dalam mempromosikan tempat wisata, influencer akan memiliki pengaruh yang signifikan di media sosial utamanya memiliki pengaruh atas para pengikutnya di media sosial. Hal tersebut akan sangat bermanfaat apabila influencer menyebarkan informasi kepariwisataan, mengingat masyarakat kita dewasa ini adalah masyarakat yang aktif bermedia sosial dan terbiasa mencari informasi salah satunya informasi tentang tempat wisata di media sosial.

Di Kabupaten Pacitan, ada 2 platform media sosial Instagram dan Tiktoks yang notabnya menjadi influencer di bidang wisata yakni *official account* “PacitanKu” dan “Pacitan Paradise”. Kedua *official account* tersebut aktif mempromosikan destinasi wisata yang ada di Pacitan. *official account* “PacitanKu” dan “Pacitan Paradise” juga merupakan mitra kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan Dalam Mempromosikan wisata di Kabupaten Pacitan.

Kolaborasi aktor dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Pacitan

A. Dinamika kolaborasi

Dinamika kolaborasi adalah bagian terpenting dari proses kolaborasi. Dinamika kolaborasi menunjukkan seberapa baik implementasi dari proses kolaborasi tersebut. Dalam proses dinamika kolaborasi, terdapat penggerakan

prinsip bersama yang mena hal tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Dalam gerakan prinsip bersama, aktor akan mempunyai tujuan yang sama dengan aktor lainnya, sehingga aktor kolaborasi harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut (Noor, 2022).

1) Pengungkapan

Kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan tidak hanya dalam hal pengembangan pariwisata namun juga dalam hal pengelolaan pariwisata. Proses pengelolaan pariwisata di Pacitan sudah berlangsung cukup baik. Hal tersebut diindikasikan dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal ini kelompok sadar wisata untuk mencapai tujuannya dalam pengelolaan aset pariwisata dan mengelola kegiatan pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkegiatan wisata.

Pokdarwis adalah mitra dari Disparpora Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan wisata yang ada di Pacitan. Pokdarwis dan Disparpora juga telah aktif berkolaborasi dengan sektor bisnis seperti pengelola, UMKM dan juga berkolaborasi dengan kelompok pegian media sosial. Seperti contoh dalam pengelolaan di objek wisata Pantai Pancer Door. Pihak pengelola mendapatkan bantuan dari Disparpora untuk pembangunan fasilitas penunjang wisata seperti gazebo dan toilet umum. Pihak pengelola pantai Pancer Door juga menjalankan peranannya dalam menyediakan tempat berjualan UMKM dengan rapi tanpa mengganggu pemandangan yang ada di objek wisata tersebut. Pihak pengelola juga aktif berdiskusi dengan para UMKM tentang bagaimana cara menjaga kebersihan diarea objek wisata dan aktivitas berjualan mereka tidak mengganggu aktivitas pengunjung yang sedang menikmati panorama objek wisata. Pelaku UMKM pun juga memiliki komitmen dalam menjaga objek wisata terbukti dengan aktifnya mereka dalam kegiatan bersih pantai yang sering diadakan oleh pihak pengelola. Namun yang menjadi kendala adalah peran dari kelompok pegiat media sosial yang ada di Kabupaten Pacitan. Harusnya Pemerintah daerah melalui Disparpora Kabupaten Pacitan memberikan penanda khusus untuk platform media sosial yang sudah berkolaborasi dengan Disparpora agar diberikan akses gratis masuk ke objek wisata yang ada di Pacitan.

2) Deliberasi (diskusi bersama)

Disparpora Kabupaten Pacitan telah berulang kali mengadakan pertemuan dan musyawarah dengan Pokdarwis untuk meminta masukan atas kondisi kepariwisataan di wilayahnya. Rutin mengadakan pertemuan dan menerima pelaporan dari para pengelola objek wisata yang ada di Pacitan. Disparpora melalui UPTD juga aktif dalam pengelolaan objek wisata, mereka juga rutin melakukan musyawarah dengan para pemamku kepentingan yang terlibat dan terdampak langsung dari objek wisata tersebut seperti masyarakat dan pelaku usaha yang ada di objek wisata. Disparpora juga melakukan

koordinasi dan memberikan pelatihan kepada para pegiat media sosial dari platform digital Instagram yang notabnya merupakan *influencer* lokal untuk terus berkontribusi mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.

3) Motivasi Bersama

Kepercayaan bersama antara pihak Disparpora dengan actor lain seperti Pokdarwis, Pengelola objek wisata dan UMKM yang berdampak langsung dengan objek wisata telah dibangun dalam proses pertemuan dan musyawarah yang sering dilakukan bersama, karena dalam setiap pertemuan, musyawarah tidak didominasi oleh salah satu pihak tetapi semua pihak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan argumennya tentang bagaimana pengelolaan objek wisata dijalankan, pihak Disparpora juga terbuka dengan usulan dari *stakeholders* lain sebagai bahan pertimbangan mereka dalam menyusun program dan kebijakan yang akan berdampak langsung dengan pengelolaan objek wisata. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita melihat bahwa pemahaman bersama antar aktor dapat dibangun melalui kerjasama dan saling menghormati peran masing-masing. Dalam hal ini, komunikasi menjadi kunci keberhasilan proses tersebut.

B. Tindakan kolaborasi

Memfasilitasi pada proses kolaborasi merupakan cara untuk mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kolaborasi. Selain memfasilitasi pertemuan dan pengembangan dengan pihak Pokdarwis, Disparpora juga menjadi fasilitator dalam pengembangan objek wisata. Baik untuk pengembangan objek wisata yang dikelola oleh swasta/masyarakat ataupun objek wisata yang dikelola langsung oleh Disparpora. Disparpora selalu hadir dalam memastikan kelayakan sarana prasarana dalam objek wisata yang ada di Pacitan. Disparpora juga aktif mencarikan sumber anggaran pembangunan objek wisata, hal tersebut sangat membantu pihak pengelola wisata dalam tata kelola pariwisata yang dikelolanya.

Disparpora juga aktif berdiskusi dan mengadakan pertemuan dengan para pegiat media sosial yang ada di Pacitan. Sepanjang tahun 2023 ini, Disparpora telah dua kali melakukan pertemuan dengan para *conten creator* atau *influencer* lokal untuk sarasehan dan melakukan pelatihan digital marketing. Hal tersebut merupakan komitmen Disparpora untuk mengakomodasi masukan-masukan dari para *influencer* lokal dalam mempromosikan potensi wisata Pacitan melalui media sosial. Disparpora juga aktif melibatkan para *influencer* lokal dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh Disparpora. Mereka juga dilibatkan dalam peliputan event-event kebudayaan bertaraf nasional yang dilakukan oleh Disparpora seperti *event* Ruat Jagat, Rontek Fest dan Gempita Jagakarya yang memperkenalkan budaya dan kearifan lokal masyarakat Pacitan.

Dalam kolaborasi dengan aktor akademisi, dalam hal ini penulis menjabarkan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang berkolaborasi dengan UGM dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Proyek

Pengembangan Masyarakat (PPM). Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan menyambut baik kolaborasi UGM dengan konsen untuk menggali potensi Pacitan utamanya sektor wisata desa. Bupati Pacitan dalam kesempatannya menemui mahasiswa dan pejabat perwakilan dari UGM di Pendopo kantor Bupati Pacitan pada 25 Juni 2023, menyatakan bahwa "Pacitan perlu pendampingan dan kolaborasi dengan masyarakat sangat indah". Bupati juga mengintruksikan agar seluruh Forkopimda bersedia memfasilitasi kegiatan akademisi UGM selama berkegiatan di Pacitan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan memerlukan peran dari akademisi dalam pendampingan ke masyarakat agar masyarakat dapat menggali potensi daerahnya dan dikonversikan ke sektor wisata seperti apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh kelompok KKN UGM di tahun 2021 yang telah berhasil menggali potensi dan mengembangkan Eco Geopark yang berada di Desa Bomo dan Piton sebagai destinasi wisata baru di Pacitan dan mampu berdampak positif pada perekonomian warga setempat.

C. Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi

Dampak kolaborasi salah satunya adalah kesadaran masyarakat akan kegiatan pengembangan wisata mulai tumbuh, pengelola juga merasa diperhatikan untuk perkembangan objek wisatanya dan *influencer* (media) lokal juga massif dalam menyebarkan informasi tentang kepariwisataan di Pacitan. Kolaborasi dengan akademisi juga berdampak dengan hadirnya sektor wisata baru di Kabupaten Pacitan dimana sekarang Pacitan memiliki 20 desa wisata potensial dan 9 desa wisata yang telah ber-SK Bupati Pacitan. Hadirnya desa wisata tersebut mampu membangkitkan ekonomi lokal pasca gempuran pandemic Covid-19.

Berdasarkan uraian analitis di atas, terlihat jelas bahwa proses kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Pacitan mempunyai dampak seperti meningkatnya partisipasi masyarakat akan kepariwisataan. Hal tersebut dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan objek wisata, ramah terhadap wisatawan, serta menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Kegiatan *sharing information* yang dilakukan oleh pegiat media sosial secara massif juga berdampak dengan meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pacitan. Dampak utama yang juga cukup baik yakni unsur dari Sapta Pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan) di objek wisata yang ada di Pacitan sudah mulai terwujud hasil dari kolaborasi semua pihak dalam mengelola objek wisata yang ada di Pacitan.

Kontribusi sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Pacitan

Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pacitan pasca covid 19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga target jumlah kunjungan wisata dapat tercapai sebesar 174,02% sehingga jumlah kunjungan wisata juga sangat mempengaruhi jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pacitan. Kontribusi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2022 terdapat target kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 11.125.000.000

dengan realisasi Capaian sebesar Rp 11.297.975.000 dengan capaian prosentase sebesar 101,54%. Dari data PAD Kabupaten Pacitan tahun 2022 yang peneliti analisa, PAD Kabupaten Pacitan mencapai 165 miliar rupiah dan untuk kontribusi dari sektor pariwisata sebesar 11 miliar rupiah atau 7% dari total PAD keseluruhan pada tahun 2022.

Tabel Kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata ke PAD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2022

Capaian	2021	2022	Growth
Jumlah Kunjungan Wisata	834.419	1.566.186	53%
Kontribusi Wisata ke PAD	4.835.091.000	11.297.975.000	43%

Sumber: Data dari dokumentasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dikelola penulis pada 2 Desember 2023

Kalau kita lihat pada tabel diatas Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 sebanyak 834.419 orang sedangkan pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.566.186 kalau kita sandingkan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2021 dan 2022 pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisata sebanyak 731.767 orang atau dengan prosentase kenaikan sebesar 53% orang yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan. Pada Capaian kinerja Perangkat Daerah Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD terdapat kenaikan yang cukup bagus setelah adanya covid 19 pada tahun 2021 capaian PAD dari pariwisata sebesar Rp. 4.835.091.000, sedangkan pada tahun 2022 capaian PAD sektor pariwisata tercapai sebesar 11.297.975.000 kalau kita sandingkan antra capaian tahun 2021 dan capaian tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp. 6.462.884.000 atau peningkatan sebesar 133% dari tahun kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kunjungan wisata sangat berpengaruh dengan kontribusi sektir wisata ke PAD. Kenaikan kunjungan wisata adalah hasil kolaborasi banyak pihak diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, swasta yang mengelola beberapa objek wisata yang ada di Pacitan, masyarakat Kabupaten Pacitan, media dan akademisi yang saling berkolaborasi dalam mempromosikan wisata yang ada di Pacitan dan berkolaborasi dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu uraian pembahasan terkait apa yang menjadi fokus penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Peran aktor kolaborasi sudah berjalan dengan baik dimana;

- a) Akademisi, Hadirnya akademisi dari UGM dan UNS yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah cukup membantu menggali potensi pariwisata yang ada di Pacitan
 - b) Bisnis, pengelola objek wisata, pengusaha homestay dan PKL telah menyediakan layanan dan fasilitas wisata yang dibutuhkan wisatawan
 - c) Komunitas, Pokdarwis cukup berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas potensi wisata daerahnya. Pokdarwis juga aktif dalam kegiatan pengembangan wisata
 - d) Pemerintah, berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pengembangan dan tata kelola wisata di Pacitan
 - e) Media, berperan dalam menyebarkan informasi kepariwisataan yang ada di Pacitan
2. Kolaborasi dalam pengembangan dan tata kelola pariwisata di Kabupaten Pacitan telah berjalan dengan baik. Berikut gambarannya;
- a) Dinamika dalam kolaborasi telah berjalan dengan baik, dimana antar actor telah melakukan pengungkapan atas apa yang menjadin tujuan kolaboiorasinya, dan hal tersebut dituangkan dalam proses diskusi hingga terciptanya motivasi bersama dalam mencapai tujuan kolaboriasi
 - b) Tindakan kolaborasi, Disarpورا sebagai aktir sentral memfasilitasi tindakan kolaboirasi seperti pelatihan dan bimbingan teknis untuk pengelola dan komunitas (pokdarwis), memfasilitasi kegiatan akademisi yang melakukan riset pengembangan potensi wisata di Pacitan dan memfasilitasi diskusi dengan para pegiat media sosial.
 - c) Dampak dan proses adaptasi kolaborasi pengelolaan wisata, terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata dan berkembangnya peluang pendapatan masyarakat, serta daya tarik wisata berkembang secara signifikan sejalan dengan konsep Sapta Pesona.
3. Proses kolaborasi telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pacitan yang berdampak dengan bertumbuhnya kontribusi sektor wisata ke Pendapatan Asli Daerah sebesar 7% pada tahun 2022.

Rekomendasi

Penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap tata kelola kepariwisataan agar mampu berkontribusi positif ke pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan

- 1) Untuk meningkatkan perkembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan memerlukan integritas yang kuat dari setiap actor kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki keterbatas dalam mengakses keseluruhan proses pengembangan wisata, jadi kolaborasi yang sudah dijalankan sepatutnya terus dijalankan dan dikuatkan peran dari masing-masing actor
- 2) Pemerintah daerah harus membuat regulasi yang konkrit terkait arah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan utamanya regulasi untuk pengembangan desa wisata. Pemerintah juga harus hadir dalam proses

pengembangan desa wisata agar 20 desa wisata yang sudah terdata mampu mendapatkan legalitas yang pasti dan dikembangkan secara maksimal

- 3) Pemerintah daerah harus lebih *aware* dengan perkembangan teknologi digital dan pemanfaatan media sosial untuk promosi dan pemasaran objek wisata. Harusnya pemerintah daerah mampu memanfaatkan, mengkoordinis dan memberdayakan *conten creator* lokal untuk menjadi mita dari Disparpora dalam peningkatan kegiatan promosi wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Akasse, C. S., & Ramansyah, R. (2023). Strategi Promosi Pariwisata melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pengunjung di Desa Wisata. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 10(1), 52–60. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.457>
- Astuti, W. dan R. (2020). *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. In *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Azwar, H., Hanafiah, M. H., Ghani, A. A., Azinuddin, M., & Shariffuddin, N. S. M. (2023). *Community-Based Tourism (Cbt) Moving Forward: Penta Helix Development Strategy Through Community Local Wisdom Empowerment*. *Planning Malaysia*, 21(1), 72–88. <https://doi.org/10.21837/PM.V21I25.1225>
- Cahyadi, H. S., & Newsome, D. (2021). *The post Covid-19 tourism dilemma for geoparks in Indonesia*. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 9(2), 199–211. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2021.02.003>
- Fatkul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Ferizaldi. (2016). *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Unimal Press. www.unimal.ac.id/unimalpress.
- Gash, A. (2022). *Collaborative governance*. *Handbook on Theories of Governance*, 6, 497–509. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412>
- Hidayatullah, S. (2022). *Creative Tourism Economic Development Strategy with the Penta Helix Collaboration of Batu City*. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 5(4), 119–129.

<http://journals.resaim.com/ijresm/article/view/1962%0Ahttps://journals.resaim.com/ijresm/article/download/1962/1902>

- Hoffman, B. L. et al. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik. *In Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Cv. Eureka media aksara.
- Insani, N., Narmaditya, B. S., Habibi, M. M., A'Rachman, F. R., & Majid, Z. (2023). *Prospect and Challenges With Penta Helix Model for Unesco Global Geopark and Local Economic Development: a Lesson From Indonesia*. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 46(1), 156–162. <https://doi.org/10.30892/gtg.46117-1011>
- Karsono, B., & Syauket, A. (2021). Otonomi Daerah “Perspektif *Human Security* dalam Negara Demokrasi.”
- Kurniadi, & Suryadi, S. (2021). *Collaborative-Governance: Teori dan Implementasi* (p. 266). CV Pena Persada. www.penapersada.com
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “*Bumiaji Agrotourism*” di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 20–29. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>
- Noor, M. (2022). *collaborative governance suatu tinjauan teoritis dan praktik* (M. R. F. dan F. Z. Yopiannor (ed.); Muhammad N). *Bildung*.
- Pham, T., & Nugroho, A. (2022). *Tourism-induced poverty impacts of Covid-19 in Indonesia*. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(2), 100069. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100069>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian*.
- Samerdanta Sinulingga. (2021). *Tourism & covid-19* (inventarisasi dampak *coronavirus* terhadap stakeholder pariwisata di Sumatera Utara). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 4*, 4(1), 170–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1562>
- Solihin, D. (2015). Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Wang, H., & Ran, B. (2023). *Network governance and collaborative governance: a thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements*. *Public Management Review*, 25(6), 1187–1211. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2011389>
- Widowati, S., Ginaya, G., & Triyuni, N. N. (2019). *Penta Helix Model to Develop Ecotourism: Empowering the Community for Economic and Ecological Sustainability*. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 31–46.